ISSN : 1907-3135

JURNAL ILMIAH

UKHUWAH

**UNIVERSITAS AL WASHLIYAH
MEDAN**

JURNAL ILMIAH UKHUWAH	Vol. 10	No. 4	Hal. 632 - 794	Medan Oktober - Desember 2015	ISSN 1907-3135
--------------------------	---------	-------	-------------------	----------------------------------	-------------------

ISSN : 1907-3135

Jurnal Ilmiah

UKHUWAH

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Syukur alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia Allah SWT, telah terbit UKHUWAH majalah ilmiah Universitas Alwashliyah (UNIVA) Medan Volume 10 No 4 Edisi Oktober – Desember 2015.

Pada edisi ini ditayangkan 24 (Duapuluh Empat) tulisan ilmiah yang terdiri atas 13 (Tiga belas) hasil penelitian dan 11 (Sebelas) karya ilmiah

Kami mengharapkan untuk terbitan pada edisi mendatang para staf pengajar di lingkungan Universitas Alwashliyah, Perguruan tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta turut berpartisipasi dalam menyumbangkan karya tulisnya sehingga dapat menjadi wahana informasi yang *up to date* bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Tim redaksi pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada staf pengajar yang telah berpartisipasi dalam mengisi terbitan pada edisi ini.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

"Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wassalam

Redaksi

Jurnal Ilmiah

UKHUWAH

Vol. 10 No. 4 Oktober - Desember 2015

DAFTAR ISI

UJI EFEK REBUSAN DAUN SAMBILOTO (<i>Andrographis paniculata</i>) TERHADAP PENURUNAN KADAR GULA DARAH PADA KELINCI Oleh : Adek Chan Staf Pengajar STIKES Helvetia Medan	632 - 637
PEMENUHAN KEBUTUHAN SPRITULITAS BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT KECEMASAN PASIE KANKER DI RSUP. H. ADAM MALIK MEDAN Oleh : BUDIANA YAZID Staf Pengajar STIKes FLORA MEDAN	638 - 642
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN SUSU FORMULA PADA BAYI USIA 0-6 BULAN DI KELURAHAN HELVETIA TIMUR Oleh : Heni Triana Staf Pengajar STIKes FLORA MEDAN	643 - 649
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU SEKSUAL REMAJA DI SMA SWASTA PRAYATNA MEDAN TAHUN 2015 Oleh : Elvi Sepriani Staf Pengajar Akbid Hafsah Medan	650 - 657
HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DENGAN PEMAKAIAN ALAT KONTRASEPSI SUNTIKAN DI KLINIK DORARA SUNGGAL KANAN TAHUN 2014 Oleh : Nurbaiti Br Singarimbun Staf Pengajar STIKes Senior Medan	658 - 664
PEMBERIAN ASI EKSklusif IBU DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS PRAPAT JANJI KECAMATAN BUNTU PANE KABUPATEN ASAHAH TAHUN 2014 Oleh : Sri Ilawati Staf Pengajar Akbid Hafsah Medan	665 - 673
GAMBARAN PELAKSANAAN BIAS OLEH TENAGA KESEHATAN PADA ANAK SD DI PUSKESMAS MEDAN TUNTOHAN TAHUN 2013 Oleh: Suhami Pintamas Sinaga Staf Pengajar STIKes Senior, Medan	674 - 684
HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP KEIKUTSERTAAN IBU MENGGUNAKAN ALAT KONTRASEPSI PIL DI DUSUN I DESA SUNGGAL KANAN TAHUN 2014 Oleh : Herlina Simanjuntak Dosen Tetap STIKes Senior Medan	685 - 693

STRATEGI PENANGGULANGAN ANEMIA GIZI

Oleh: Kristiwa Masnita Saragih Staf Pengajar Akbid Darmo Medan 694 - 697

KONSEP MOTIVASI MELALUI NILAI Pandang Perspektif Psikologi Kognitif

Oleh: Lermiana Purba Staf Pengajar Akper Kesdam I/BB Medan 698 - 700

PERANAN LEMAK SEBAGAI ENERGI SELAMA LATIHAN

Oleh : Martaulina Sinaga Staf Pengajar Akper RSU Hema 701 - 704

KECUKUPAN GIZI DAPAT MEMPENGARUHI KESEHATAN IBU HAMIL

OLEH : Mastiur Pangaribuan Staf Pengajar AKPER RSU HERNA 705 - 710

HUBUNGAN PELAYANAN SPIRITUAL YANG DIBERIKAN PERAWAT DENGAN KEPUASAN PASIEN DIABETES MELLITUS DI RUMAH SAKIT ISLAM MALAHYATI

Oleh : Rina Rahmadani Sidabutar Staf Pengajar STIKES FLORA MEDAN 711 - 719

PEMBANGUNAN NASIONAL BERWAWASAN KESEHATAN

Oleh : Tiomarni Lumban Gaol Staf Pengajar Akper RSU Hema 720 - 725

ASPEK HUKUM COMMERCIAL PAPER

Oleh : Dalinama Telaumbanua, SH, MH Staf Pengajar STIH NIAS SELATAN 726 - 737

PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA DALAM HAL KETERLAMBATAN PEMBAYARAN FEE MENURUT K.U.H. PERDATA

Oleh : (1) Hardi Mulyono, S.E., M.AP. Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

(2) Zamalludin Sembiring, S.E., S.Pd. M.H Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah 738 - 752

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI

Oleh : Ivone Staf Pengajar ASM Cendana, Medan 753 - 756

HUBUNGAN PELATIHAN DENGAN PRODUKTIVITAS KERJA

Oleh : Juliana, SE, MBA Dosen ASM Cendana, Medan 757 - 759

ASPEK HUKUM COMMERCIAL PAPER

Oleh : Dalinama Telaumbanua, SH, MH*)

Abstrak

Salah satu jenis transaksi yang sedang berkembang belakangan ini adalah *Commercial Paper* yang telah dikenal di Indonesia, dan merupakan salah satu alternatif pendanaan yang paling mudah dan cepat. Bentuk-bentuk surat berharga juga turut mengalami berbagai macam kemajuan dan berkembang pesat. *Commercial Paper* merupakan salah satu alternatif pembiayaan dalam suatu perusahaan selain beberapa alternatif lainnya. Pada saat ini *Commercial Paper* sedang menjadi sorotan banyak kalangan yang berpendapat bahwa *Commercial Paper* mempunyai prospek yang sangat cerah di masa yang akan datang.

Key words: aspek hukum, *comercial paper*

I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam era globalisasi sekarang ini, percepatan pertumbuhan ekonomi terasa semakin meningkat dan kompleks. Dalam bidang perdagangan dan jasa saat ini diperlukan bentuk-bentuk transaksi yang sangat mudah dan cepat. Salah satu jenis transaksi yang sedang berkembang belakangan ini adalah *Commercial Paper* yang telah dikenal di Indonesia, dan merupakan salah satu alternatif pendanaan yang paling mudah dan cepat. Sejak awal tahun 1980-an pemerintah telah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan deregulasi pada sektor riil, sektor finansial. Pengembangan sektor finansial di Indonesia dapat dikelompokkan dalam tiga upaya, yaitu: sistem pengembangan yang berlandaskan pada mekanisme pasar, pengembangan instrumen-instrumen pasar finansial serta pengembangan aktifitas-aktifitas pendukung kedua hal tersebut - dan *Commercial Paper* merupakan salah satu bentuk pengembangan pasar finansial.

Untuk itu pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 49/52AJPG yang masing-masing bertanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Perdagangan dan Penerbitan Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) melalui Bank Umum di Indonesia. Bank Umum mempunyai pedoman yang seragam dan memiliki dasar hukum yang kuat terhadap adanya Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) terutama dalam penggunaannya dalam pengembangan investasi.

Pada prinsipnya *Commercial Paper* adalah surat hutang. Suatu surat yang menyatakan bahwa suatu perusahaan berjanji membayar pada tanggal tertentu kepada pemegang *Commercial Paper*. Peranan *Commercial Paper* sebagai alternatif pendanaan atau pembiayaan dalam kegiatan pasar uang di Indonesia dirasakan mulai sangat penting. Faktor-faktor yang menciptakan kondisi para pelaku pasar uang giat mencari alternatif lain dari sumber penanaman pembiayaan dana antara

lain adalah likuiditas perekonomian yang ketat, tingkat suku bunga di dalam negeri yang relatif tinggi, dan ekspansi kredit yang cenderung melambat.

Jadi *Commercial Paper* itu sebetulnya sama dengan surat hutang lainnya seperti *promes* dan *obligasi*. Walaupun pada saat ini *Commercial Paper* sedang menarik perhatian berbagai kalangan, sebenarnya ketentuan yang mengatur mengenai

Commercial Paper ini belum ada, sehingga masyarakat masih mengkhawatirkan tentang kepastian hukum atas kepemilikan *Commercial Paper*.

Oleh karena itu aturan main tentang *Commercial Paper* sudah sangat mendesak dan hal ini seharusnya mulai dipikirkan mengingat akhir-akhir ini *Commercial Paper* sedang menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang sangat diminati oleh kalangan yang membutuhkannya.

Sebagai salah satu kegiatan dalam bidang bisnis, *Commercial Paper* tentu memerlukan suatu dasar hukum agar dapat berlaku dan mempunyai kekuatan pada pihak-pihak yang menggunakannya. Namun pada saat ini instrumen hutang yang sebenarnya bagi hukum dan bisnis Indonesia merupakan produk baru, aspek yuridisnya belum tertera dan belum jelas kualifikasinya.

Di Indonesia pada umumnya masyarakat masih awam terhadap instrumen pasar uang seperti *Commercial Paper*. Seringkali indikator yang digunakan untuk menilai instrumen pasar uang tersebut adalah pendapatan saja dan kurang memperhatikan aspek resiko dan

keamanan investasi. Padahal seharusnya kalangan yang membutuhkannya lebih mengutamakan segi keamanan investasi dibanding unsur profitnya.

Commercial Paper mengandung resiko besar karena tiada jaminan apapun. Oleh karenanya masyarakat harus berhati-hati akan kelemahan *Commercial Paper* terutama bagi investor baru sehingga tidak terjebak kredit macet gaya baru akibat sebagian penerbit tidak dapat membayar kembali *Commercial Paper* yang telah dijanjikan. Ini dapat terjadi karena di Indonesia belum ada aturan khusus yang membahas mekanisme perdagangan *Commercial Paper*.

Adapun permasalahan pada tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Aspek Hukum *Commercial Paper* di Indonesia?
2. Bagaimana eksistensi *Commercial Paper* dalam dunia usaha ditinjau dan Hukum Dagang?

Tujuan Penulisan

Tuisan makalah ini bertujuan untuk mnegtahui Aspek Hukum *Commercial Paper*

Metode Penulisan

Penulisan makalah menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan menggunakan data sekunder dengan menjawab terhadap permasalahan yang diajukan

Pembahasan

1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Commercial Paper

Istilah *Commercial Paper* kemudian dicoba di Indonesia dengan istilah surat sanggup tanpa jaminan yang baru dikenal di Indonesia karena perkembangan globalisasi dewasa ini.

Menurut *Dictionary of Business Term* dalam buku Munir Fuady yang berjudul *Hukum Perkreditan Kontemporer* : "*Commercial Paper* diartikan sebagai suatu obligasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo berkisar 2 sampai 270 hari, yang dikeluarkan oleh bank atau perusahaan atau peminjam lain kepada investor yang mempunyai uang cash untuk sementara waktu. instrumen tersebut tidak ada jaminannya (*unsecured instrument*) dan biasanya diberikan secara *discount* sungguhpun didapati juga yang memberikan bunga tertentu".

Commercial Paper memang merupakan produk dan perkembangan dunia usaha yang berkembang pesat belakangan ini. Perkembangan ini membuat Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia praktik tertinggal. Mengingat perubahan ini maka bank Indonesia sejak tanggal 11 Agustus 1995 mengeluarkan Surat Keputusan yang mengatur tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) melalui bank umum di Indonesia.

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR ini, *Commercial Paper* adalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan perusahaan bukan bank atau

perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.

Sedangkan yang merupakan ciri-ciri dan suatu *Commercial Paper* menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang dituangkan dalam Surat Edaran No. 28/49/UPG antara lain:

1. Merupakan janji untuk membayar tanpa syarat.
2. Merupakan surat berharga yang tergolong ke dalam surat sanggup.
3. Berjangka waktu pendek yaitu tidak melebihi 9 bulan.
4. Umumnya diperjual belikan dalam bentuk *discount*
5. Tidak mempunyai jaminan hutang
6. Umumnya dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah punya nama ataupun perusahaan yang telah dirating bagus oleh perusahaan peringkat.
7. Merupakan instrumen pasar uang, sungguhpun dapat dikembangkan untuk menjadi instrumen pasar modal.

Hingga saat ini belum ada pengaturan yang khusus mengenai *Commercial Paper* di Indonesia. Oleh karena itu *Commercial Paper* tidak dapat disebutkan secara pasti. Ada yang membedakannya berdasarkan apakah *Commercial Paper* itu memakai pengaturan penerbitan (*arranger*) atau tidak. apakah *Commercial Paper* tersebut memakai perjanjian jual beli atau tidak, atau apakah *Commercial Paper* itu memakai jaminan atau tidak. Ada juga yang membedakan berdasarkan kriteria yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang yaitu merupakan surat promes atau bukan.

1.2 Syarat-Syarat *Commercial Paper*

Syarat-syarat formal penerbitan *Commercial Paper* melalui bank umum di Indonesia menjadi jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 termasuk persyaratan mengenai pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang diakui di dalam negeri. Pasal 2 yang mengatur persyaratan formal *Commercial Paper*, yaitu sebagai berikut, mencantumkan:

1. Klausula sanggup dan kata-kata "SURAT SANGGUP" di dalam teksnya dan dinyatakan dalam bahasa Indonesia.
2. Janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Penetapan hari bayar
4. Penetapan pembayaran
5. Nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantinya
6. Tanggal dan tempat surat sanggup diterbitkan
7. Tanda tangan penerbit, pada halaman muka *Commercial Paper* sekurang-kurangnya dicantumkan hal-hal sebagai berikut:
8. Kata-kata "SURAT BERTANGGUNG JAWAB Komersial (COMMERCIAL PAPER)" yang ditulis kata-kata "SURAT

SANGGUP" sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 diatas;

9. Pernyataan "tanpa protes" dan "tanpa biaya" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 176jo Pasal 145 KUHD;
10. Nama bank atau perusahaan efek dan nama serta tanda tangan pejabat bank atau perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen tanda keaslian *Commercial Paper*, tanpa penempatan logo atau perusahaan efek secara mencolok;
11. Nama dan alamat bank atau perusahaan yang ditunjuk sebagai pembayar tanpa penempatan logo bank atau perusahaan secara mencolok;
12. Nomor seri *Commercial Paper*;
13. Keterangan cara penguangan *Commercial Paper* sebagaimana diatur dalam pasal 4 surat keputusan ini.

Pada halaman belakang *Commercial Paper* dicantumkan berikut:

1. Pernyataan mengenai *endosemen blanko* tanpa hak regres dengan klausula "Untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres".
2. Cara perhitungan nilai tunai

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Surat Keputusan yang dimaksud tidak bersifat liminitif dalam arti boleh ditambah. Sifatnya adalah sebagai persyaratan minimal hingga halaman muka dan halaman belakang dan *Commercial Paper* sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang ditetapkan. Penambahan dapat dilakukan

sepanjang tidak bertentangan dengan maksud ketentuan tersebut.

1.3 Hubungan Para Pihak Dalam Commercial Paper

Dalam penerbitan *Commercial Paper*, pihak-pihak yang berperan adalah *insuer, arranger, issuing agent, paying agent, dealer, investor*. Akan dijelaskan lebih rinci mengenai masing-masing pihak yang terkait dengan *Commercial Paper*:

1. *Issuer*, adalah perusahaan atau pihak penerbit *Commercial Paper*. Dapat juga dikatakan sebagai "peminjam" yang membutuhkan pinjaman jangka pendek.

2. *Arranger* (pengaturan penerbitan), adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan penerbit *Commercial Paper* mengatur rencana penerbitan *Commercial Paper*.

3. *Issuing Agent*, adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit *Commercial Paper* melakukan pengabsahan *Commercial Paper*.

4. *Dealer* (pedagang efek), adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh calon penerbit *Commercial Paper* untuk mengusahakan penjualan dan atau pembelian *Commercial Paper*, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya.

5. *Investor* (pemodal), adalah perorangan atau badan hukum domestik

maupun asing yang membeli *Commercial Paper*. Selain para pihak yang telah diuraikan tadi, ada satu pihak yang sangat dibutuhkan dalam melancarkan jalannya penerbitan *Commercial Paper*. Lembaga ini adalah LEMBAGA PEMERINGKAT (*CREDIT RATING*). Di Indonesia dikenal dengan nama PT. PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia) yang berdiri tahun 1993.

Kehadiran lembaga pemeringkat ini akan sangat bermanfaat karena pada dasarnya lembaga ini melakukan penilaian atas resiko kredit dan suatu perusahaan berdasarkan beberapa faktor seperti kinerja usaha, aspek manajemen dan prospek usaha.

Persyaratan penting yang harus diperhatikan dan lembaga pemeringkat ini antara lain mengenai *independency*, yaitu tidak ada unsur keterlibatan pemerintah maupun perusahaan yang berkepentingan sebagai pemegang saham dan lembaga tersebut, sehingga rating yang dihasilkan benar-benar objektif. Masalah lain yang juga harus diperhatikan dalam kriteria yang perlu ditetapkan agar *Comparable* dengan standart penilaian negara lain. Tidak kalah pentingnya adalah masalah integritas dan lembaga yang tercermin bukan hanya dan dewasa pengawas tetapi juga dan dewan penilai.

1.4 Penerbitan dan Berakhirnya Commercial Paper

Perdagangan *Commercial Paper* dilakukan dengan mekanisme *dealer ship* yaitu

suatu mekanisme dimana calon penerbit *Commercial Paper* akan menghubungi pengatur penerbitan atau sebaliknya. Karena pada saat telah ada lembaga pemeringkat yang melakukan penilaian atas resiko kredit suatu perusahaan maka pengatur penerbitan akan menghubungi lembaga pemeringkat untuk mengetahui tingkat kredibilitas calon penerbit *Commercial Paper*.

Lembaga pemeringkat akan menilai apakah calon penerbit dan pernyataan peringkat *Commercial Paper* akan diserahkan oleh Lembaga Pemeringkat kepada pengatur penerbitan. Setelah memperoleh sertifikat pemeringkat *Commercial Paper* maka pengaturan penerbitan akan menerbitkan memorandum informasi yang objektif mengenai calon penerbit melalui media cetak.

Disamping itu perlu pula disajikan laporan keuangan kuartalan yang terbaru, anggaran dasar penerbit, tanggung jawab hukum dan semua pihak yang terlibat dalam transaksi dan peringkat kegiatan *Commercial Paper*. Kegiatan sebagai pengatur menyampaikan laporan kepada bank Indonesia dengan format yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/49/UPG tanggal 11 Agustus 1995.

Pengatur penerbitan akan menghubungi agen penerbitan dan agen pembayaran. Dalam memilih agen penerbitan dan agen pembayaran dilakukan secara kompetitif. Agen penerbit wajib melakukan penulisan atas kebenaran prosedur penerbitan *Commercial Paper*, baik dan segi administratif maupun dan segi yuridis. Yang dimaksud dengan hal-hal yang bersifat

administratif adalah penulisan atas kebenaran prosedur penerbitan dengan memperhatikan antara lain anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan calon penerbit *Commercial Paper*, serta keaslian kertas komersial *Paper* yang bersangkutan. Segi yuridis yang perlu diperhatikan adalah pemenuhan undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

Agen pembayar mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas *Commercial Paper* pada saat jatuh tempo. *Commercial Paper* yang tidak ditunaikan setelah melampaui waktu enam bulan sejak jatuh tempo dapat ditunaikan langsung pada penerbit *Commercial Paper*. Perlu dipahami bahwa agen pembayar tidak menjamin pembayar tetapi hanya melaksanakan pembayaran *Commercial Paper* yang jatuh tempo bila dananya disediakan oleh penerbit *Commercial Paper*.

Jika pengatur penerbitan telah mendapatkan agen penerbitan dan agen pembayaran maka diadakan perjanjian antara penerbit dengan agen penerbitan dan agen penerbit dengan agen pembayaran. Dalam perjanjian tersebut diuraikan kewajiban masing-masing agen serta *fee* yang menjadi haknya untuk jasanya ini.

Selanjutnya, agen penerbit mulai menjual *Commercial Paper* kepada investor pertama, secara langsung maupun melalui dealer*. Apabila investor pertama ingin menjual *Commercial Paper* pada investor kedua dapat dilakukan dengan cara endorsemen blanko dan tanpa hak regres. Investor kedua dapat

menguangkan *Commercial Paper* setelah jatuh tempo pada agen pembayar.

2. BERAKHIRNYA *COMMERCIAL PAPER*

a. Dengan cara peralihan

Cara peralihan *Commercial Paper* melalui sanggup diatur dalam pasal 110 sampai dengan Pasal 119 KUHD. Untuk mengetahui bagaimana cara peralihan melalui surat sanggup terlihat dan klausula yang terdapat dalam surat sanggup tersebut. Klausula yang terdapat dalam surat sanggup adalah hanya atas pengganti.

Berdasarkan Pasal 110 KUHD bahwa surat berharga yang berklausula atas pengganti dan cara peralihan dengan jalan "endosemen". Endosemen adalah lembaga pemindahan hak milik atas tagihan pada surat berharga yang berklausula atas pengganti. Dalam melakukan endosemen harus tidak bersyarat, setiap persyaratan yang dimasukkan kedalamnya dianggap tidak ada, dan apabila endosemen dilakukan untuk sebagian maka endosemen tersebut batal, sedangkan endosemen atas tunjuk berlaku sebagai endosemen blanko (Pasal 111 KUHD).

Cara penulisan endosemen adalah harus ditempatkan pada surat sanggup atau pada halaman yang terjerat padanya (sambungan) dan kemudian endosemen tersebut harus ditandatangani oleh endosan. Endosemen tidak dapat menyebutkan *geendoseerde* atau terdiri atas tanda tangan saja dan endosan (endosan blanko) dalam hal terakhir supaya sah endosemen, harus ditempatkan dibagian

belakang dan surat sanggup atau pada sambungannya.

Dengan telah dilakukan endosemen oleh pemegang pertama pada pemegang berikutnya, maka semua hak-hak yang terbit dan surat tersebut beralih atau pindah dengan catatan pemegang tersebut memperoleh surat sanggup dengan jujur. Dalam rangka memperlancar peralihan surat berharga khususnya KUHD memperbolehkan melakukan endosemen blanko, sehingga pemegang dapat dengan mudah : (Pasal 113 KUHD).

1. Mengisi blanko itu, baik dengan namanya sendiri maupun dengan nama orang lain.
2. Mengandosir surat sanggup itu blanko lagi atau mengandosirnya pada orang lain.
3. Menyerahkan surat sanggup pada pihak ketiga, dengan tidak mengisi blanko dan dengan tidak mengandosirnya.

Suatu endosemen dapat memuat pernyataan "jumlah untuk jaminan", jumlah untuk gadai atau pernyataan Jain yang membawa serta pemberian gadai didalamnya, maka pemegang dapat melakukan segala hak-hak yang timbul dan surat sanggup tetapi suatu endosemen yang ditempatkan olehnya hanya berlaku sebagai endosemen dengan jalan pemberian kuasa. Penghutang surat sanggup pada pemegang ini tidak dapat mengemukakan upaya-upaya tangkisan yang berdasar atas hubungan pribadi mereka dengan endosemen, kecuali apabila pemegang pada penerimaan

surat sanggup itu sengaja telah berbuat yang merugikan penghutang (Pasal 118 KUHD).

Suatu endosemen yang ditempatkan sesudah han gugur, mempunyai akibat yang sama seperti suatu endosemen yang ditempatkan sebelum han gugur. Akan tetapi endosemen yang ditempatkan setelah proses non pembayaran atau setelah lampaunya tenggang yang ditentukan untuk mengajukan protes hanya mempunyai akibat dari sesi biasanya kecuali apabila ada bukti sebaliknya, maka endosemen tanpa penanggalan dianggap ditempatkan sebelum lampaunya tenggang waktu yang ditentukan untuk mengajukan protes (Pasal 119 KUHD).

b. Penguangan Commercial Paper

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR, tanggal 11 Agustus ada dua cara penguangan surat berharga komersial yaitu:

1. Surat berharga komersial yang jatuh waktu dapat ditagihkan sejumlah nilai nominal pada agen pembayar selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak saat jatuh waktu.
2. Setelah jangka waktu tersebut, surat berharga komersial hanya dapat ditagih langsung kepada penerbit.

Kadangkala dalam penulisan surat berharga antar berupa tulisan nominal dengan hurup berbeda, mengenai hal ini menurut Surat Keputusan Bank Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat berharga komersial yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang

ditulis dalam huruf dan dalam angka yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapnyanya. Hal ini senada dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum.

2. Dalam jumlah uang tertulis ditulis berulang-ulang dan dapat selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil.
3. Setiap perubahan amanat yang telah tertulis dalam surat berharga komersial harus ditanda tangani oleh penerbit tempat kosong yang tedekat dengan perubahan dan ditanda tangani serta oleh pengatur penerbit dengan mencantumkan tanggal perubahan tersebut.

c. Lampaunya Waktu

Lampau waktu atau kadaluarsa merupakan suatu kondisi yang berhubungan dengan masa atau waktu berlakunya surat berharga, apakah suatu surat berharga yang masih berlaku atau tidak atau kapan suatu surat berharga telah jatuh waktu atau dapat dicairkan pada si penerbit atau si tersangkut. Ketentuan lampau waktu surat sanggup diatur dalam Pasal 168 a sampai dengan Pasal 170 KUI-ID. Menurut ketentuan Pasal 169 KUHD bahwa semua penuntutan hak yang timbul dan surat sanggup terhadap akseptan, lampau waktu dengan lampaunya waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak hari gugur. Penuntutan-penuntutan hak dan pemegang terhadap endosan-endosan dan terhadap penerbit lampau waktu karena lampaunya waktu 1 (satu) tahun, dihitung di hari penanggalan protes yang dibuat tepat pada waktunya atau bilamana ada klausula biaya, sejak hari

gugurnya. Penuntutan-penuntutan hak dan endosan-eridosan terhadap satu sama lain dan terhadap penerbit lampau waktu karena lampaunya waktu 6 (enam) bulan, sejak hari dimana endosan membayar surat sanggup untuk memenuhi wajib regresnya atau sejak hari dimana ia sendiri dimuka hakim keterlambatan waktu yang dimaksud dalam hal di atas tidak dapat dikemukakan oleh akseptan bila atau sekedar ia menerima dana atau ia memperkaya diri yang tidak dibenarkan.

3. ASPEK HUKUM COMMERCIAL PAPER

3.1. Aspek Hukum Commercial Paper di Indonesia

Commercial Paper merupakan salah satu instrumen hutang jangka pendek yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan sumber dan penempatan dana jangka pendek bagi perusahaan terkemuka. Untuk memacu agar jenis instrumen ini dapat diperdagangkan sehingga dapat berfungsi sebagai alat likuid maka diperlukan peraturan-peraturan permainan demi terciptanya perdagangan yang efektif.

Akhir-akhir ini *Commercial Paper* mulai dibicarakan oleh berbagai kalangan dan dibahas dalam beberapa seminar. Dan beberapa seminar yang diadakan terdapat perbedaan pendapat antara para pakar mengenai dasar hukum perdagangan *Commercial Paper* di Indonesia. Pendapat pertama menyatakan *Commercial Paper* adalah warkat pasar uang baru yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia, baik peraturan

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun diluar KUHD. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa *Commercial Paper* diatur dalam KUHD Buku I Bab 6 khususnya tentang promes.

a. *Commercial Paper* tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jika *Commercial Paper* tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, apa dasar hukumnya?

Menurut pendukung pendapat ini, dasar hukumnya semata-mata perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang mengeluarkan *Commercial Paper* (Pasal 1338 KUHPerdara).

Perjanjian-perjanjin tersebut adalah:

1. Perjanjian penerbitan *Commercial Paper* (*issuing agency agreement*) antara penerbit *Commercial Paper* dengan agen penerbit *Commercial Paper*.
2. Perjanjian pembayaran *Commercial Paper* (*paying agency agreement*) antara penerbit *Commercial Paper* dengan agen pembayar *Commercial Paper*. (Kedua perjanjian ini dapat dijabat oleh pihak yang sama).
3. Perjanjian jual beli *Commercial Paper* (*note purchase agreement*) dan sertifikat anatara penerbit dengan investor.

Dalam perjanjian jual beli *Commercial Paper* dengan sertifikat yang menyatakan bahwa investor mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan perjanjian jual beli *Commercial Paper* itu sendiri. Menurut hukum Indonesia, keabsahan perjanjian seperti itu diragukan dan sangat mungkin hakim akan membatalkannya dengan

alasan bertentangan dengan itikad baik (pasal 533 dan 1965 KUHPerdara), khilaf, diperoleh dengan paksaan atau penipuan (Pasal 1322 KUHPerdara). Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa *Commercial Paper* dapat diperdagangkan tanpa suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya adalah sama sekali keliru.

b. *Commercial Paper* adalah Promes menurut KUHD

Beberapa pakar berpendapat bahwa *Commercial Paper* adalah promes yang diatur dalam KUHD pada Buku I Bab 6, khususnya mengenai promes (bagian 13) dan Buku I Bab 7 bagian ke 2 (promes atau bawah) yang dikonfirmasi oleh Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/31 /UPG tanggal 27 Oktober 1998 tentang Perdagangan Surat Berharga Pasar Uang yang menunjuk kepada "surat sanggup (aksept/promes)" sebagaimana diatur oleh Pasal 174 KUHD.

Dengan demikian jelas bahwa *Commercial Paper* yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang wajar untuk memperoleh keuntungan bunga bagi investornya (90/180/270) hari atau jangka waktu lain antara itu) adalah promes atas nama atau atas tunjuk/pengganti (*op naan of order*).

Sedangkan pengalihan atau penjualan promes dan pemegang pertamanya kepada pemegang berikutnya adalah dengan endorsemen (Pasal 170 KUHD jo Pasal 110-119 KUHD) yang dilakukan dibalik lembar promes atau lembaran sambungan yang dilekatkan

pada lembar promes (Pasal 122 ayat (1) KUHD).

Dalam prakteknya di Indonesia, sangat disayangkan bahwa hampir semua *Commercial Paper* yang diterbitkan cfm diperdagangkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yaitu *Commercial Paper* diterbitkan kepada pembawa (*aan to order, bearer note*) dan dialihkan dengan cara menandatangani sertifikat jual beli promes. Diterbitkannya *Bearer notes* lebih mudah dialihkan daripada promes atas nama atau pengganti.

Perlindungan hukum yang diberikan pemegang *bearer notes* di negara-negara maju sudah sangat baik, sedangkan di Indonesia, dasar hukumnya saja untuk memperdagangkan *tradeable bearer notes* tidak ada. Apabila tiada pelunasan dalam batas waktu pertama, ia harus menawarkan kepada pemberi *Commercial Paper* agar *Commercial Paper* tersebut ditariknya kembali.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Commercial Paper bearer notes* eks Pasal 229i KUHD tidak layak untuk diperdagangkan di pasar uang karena jangka waktunya sangat pendek (6 hari + 6 hari). Ada juga yang berpendapat bahwa promes kepada pembawa yang diatur dalam KUHD jangka waktu jatuh temponya enam bulan. Hal ini didasarkan pada Pasal 229k KUHD yang menetapkan bahwa hak menggugat ke pengadilan terhadap penerbit promes kepada pembawa atau terhadap mereka yang menggunakan promes tersebut sebagai alat pembayaran adalah dalam waktu

enam bulan setelah tanggal diterbitkannya promes.

Walaupun demikian mungkin timbul pertanyaan bagaimana jika penerbit dengan sukarela menafsirkan Pasal 229k KUHD bahwa jatuh tempo promes atas bawa yang diterbitkannya adalah enam bulan. Hal ini tentunya membawa konsekuensi bahwa penerbit bersedia menjual promesnya dengan diskonto bunga selama enam bulan.

Sebaliknya jika penerbit *bearer Commercial Paper*nya dengan sistem "kupon bunga" (bunga dibayar setelah jatuh tempo) maka kupon bunga yang jatuh tempo telah lewat masa enam hari sejak penerbitan adalah tidak sah menurut hukum, sehingga penerbit dapat menolak untuk membayarnya yang dapat mengakibatkan pemegang *bearer Commercial Paper* dirugikan. Dari keterangan di atas jelaslah bahwa:

1. Kebanyakan *Commercial Paper* yang beredar saat ini (*Commercial Paper* dalam bentuk Promes pada pembawa / *bearer note* yang jatuh temponya lebih dari enam hari) adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku (Pasal 174 KUHD) dan oleh

karenanya tidak memberi perlindungan hukum pada pemiliknya.

2. Sebaliknya, pemegang *Commercial Paper bearer note* dapat menuduh penerbit, agen penjual dan penanggung melakukan tindakan pidana penipuan karena menjual barang haram. Demikian juga dengan gugatan perdata dapat diajukan berdasarkan tuduhan penipuan ini (Pasal 1322 jo Pasal 1328 KUHPerdata).

Sebelum keluarnya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 tampaknya tidak terdapat keseragaman pengertian mengenai *Commercial Paper* karena KUHD tidak mengenai *Commercial Paper* sebagaimana definisi universal yang berlaku.

KESIMPULAN

- a. *Commercial Paper* yang merupakan instrumen baru di pasar uang adalah merupakan surat berharga yang lahir dalam praktek perbankan karena kebutuhan.
- b. Eksistensi *Commercial Paper* dalam dunia usaha ditinjau dari Hukum Dagang dipilih sebagai suatu alternatif sumber untuk memperoleh dana pembiayaan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Emirzon Joni, 2001. *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT.Prenhallindo. Jakarta, 2001.

Fuadi Munir, 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Muhammad Abdulkadir. 1996. *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Sastrawidajadja Man Suparman. 1993, *Penggunaan Bentuk dan Penggunaan Surat Berharga Dalam Praktek Perbankan Yang Diatur Diluar KUHD*, Jakarta, 16— 19 November 1993.

_____, 1997. *Aspek-Aspek Hukum Surat Berharga*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung .

Seruji Andi, 1996a. *Banyak Commercial Paper Bakal Rontok*, Kompas. 8 Mei 1996.

_____. 1996 b. *KUHD Disempurnakan Buat Lindung Commercial Paper*, Bisnis Indonesia, 24 Mei 1996.

Setijaprodjo Bambang. 1995. *Beberapa Surat Berharga Dalam Praktek Perbankan*, Surabaya, 16 November 1995.

Setyawan Rene, 1995. *Pasar Surat Berharga Komersial di Indonesia*, Jakarta, 25 September 1995.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus *Tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Commercial Paper*.